

KEWARGAAN DAN NATION-STATE: ANALISIS PEMISAHAN TIMOR TIMUR DARI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBENTUKAN IDENTITAS NASIONAL

Kayla Putri Alena¹, Izza Nasywa², Fauzan Ramdani Ahmad³, Aniqotul Ummah⁴

2310413197@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310413175@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310413197@mahasiswa.upnvj.ac.id³, aniqotul.ummah@upnvj.ac.id⁴

Universitas Pembangunan Nasional

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada peran kewarganegaraan aktif dalam menciptakan stabilitas politik di Indonesia dalam konteks politik kontemporer. Kewarganegaraan aktif berarti berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Hal ini termasuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, berbicara di depan umum, dan mendukung kebijakan. Studi ini menemukan beberapa keuntungan dari kewarganegaraan aktif, seperti stabilitas sosial yang lebih besar, transparansi, akuntabilitas pemerintah dan demokratisasi. Namun, ada kendala struktural dalam pendidikan dan ekonomi, akses informasi yang terbatas, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Hal-hal tersebut merupakan beberapa masalah yang menghambat partisipasi warga negara. Penelitian ini menyarankan beberapa cara untuk mengatasi masalah tersebut, seperti meningkatkan pendidikan kewarganegaraan berbasis teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan akses informasi yang lebih transparan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga negara, yang akan menghasilkan stabilitas politik yang lebih kuat dan demokrasi yang inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: Kewarganegaraan Aktif, Stabilitas Politik, Demokrasi, Partisipasi Politik.

PENDAHULUAN

Konsep kewarganegaraan dan nation-state sangat penting dalam memahami dinamika hubungan antara individu, masyarakat, dan negara dalam konteks pembentukan identitas nasional. Nation-state adalah entitas politik yang memiliki kedaulatan penuh, dan identitas nasional berasal dari kesamaan budaya, sejarah, atau nilai-nilai tertentu. Sementara itu, hak, kewajiban, dan status seseorang sebagai warga negara terkait dengan kewarganegaraan. Salah satu contoh penting dari penelitian ini adalah pemisahan Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999; itu adalah peristiwa politik dan gambaran dari proses yang kompleks untuk membangun identitas nasional (Smith, 1991; Jardine, 2018; Carey, 2004).

PBB mendukung referendum yang memisahkan Timor Timur dari Indonesia. Keputusan ini dibuat sebagai tanggapan atas kegagalan pemerintah Indonesia untuk melakukan integrasi politik dan asimilasi selama pemerintahan Orde Baru. Perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang diwariskan dari kolonialisme Portugis memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional yang berbeda di Timor Timur. Dalam kasus ini, pemisahan Timor Timur bukan hanya langkah menuju kemerdekaan; itu adalah upaya untuk membangun negara bangsa dan kewarganegaraan yang sesuai dengan keinginan orang-orang di sana (Anderson, 1983; Gellner, 1983).

Identitas nasional dan kewarganegaraan memengaruhi pemisahan ini. Ini adalah masalah utama. Ketidakpuasan berasal dari kurangnya pengakuan hak-hak masyarakat Timor Timur secara sipil, politik, dan sosial selama integrasi dengan Indonesia. Referendum tahun 1999 memberi rakyat Timor Timur kesempatan yang sah untuk menyatakan keinginan politik mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya legitimasi untuk membangun negara bangsa yang berdaulat dan mengakui identitas nasional yang inklusif (Marshall, 1950; Kymlicka, 1995).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa peran masyarakat dalam pembentukan negara Timor Timur pasca-pemisahan; menemukan faktor-faktor yang menyebabkan pemisahan dari sudut pandang identitas nasional; dan mengeksplorasi bagaimana identitas nasional dan kewargaan berkontribusi pada proses pembentukan negara independen. Penelitian ini menggunakan teori seperti negara bangsa dan kewargaan untuk memberikan wawasan tentang kesulitan pembentukan negara bangsa modern dan kesulitan mendapatkan legitimasi politik dan kesetiaan di tengah keanekaragaman budaya dan sejarah kolonial (Weber, 1946; Brubaker, 1992).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik deskriptif-analitis. Hal ini karena para peneliti membutuhkan informasi yang lebih mendalam terkait analisis perbedaan Timor Timur dari Indonesia dari perspektif pembentukan identitas nasional dan kewargaan negara. Melalui pendekatan kualitatif, para peneliti dapat mengetahui bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk dapat menentukan temuan dari penelitian ini. Penelitian kualitatif dilakukan dengan berbagai cara, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka (Sadjadja dan Heriyanto 2006:49).

Pada penelitian ini, para peneliti menggunakan teknik penelitian dalam mengumpulkan data melalui data primer, yaitu Dokumen resmi, seperti arsip pemerintah, laporan internasional, dan pernyataan orang penting, data primer digunakan Untuk mempelajari dinamika politik, sosial, dan hukum yang mendasari pemisahan Timor Timur dari Indonesia, sumber-sumber ini memberikan sudut pandang langsung dari para aktor penting.

Selanjutnya, para peneliti juga mendapatkan informasi terkait dengan data penelitian melalui data sekunder atau studi literatur yang didapatkan melalui penelitian, jurnal, dan buku yang membahas kewargaan, identitas nasional, dan hubungan antara Timor Timur dan Indonesia. Data diperoleh melalui website resmi yang akurat seperti google scholar, situs dan berita resmi yang sesuai dengan topik penelitian, serta dokumen-dokumen yang sesuai dengan topik penelitian yang diangkat pada penelitian ini. Studi pustaka ini penting dilakukan untuk dapat mendukung dan memberikan validitas terkait dengan data penelitian.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data yang mengacu pada konsep Creswell (2013), analisis tematik melibatkan pengelompokan data ke dalam tema-tema utama yang muncul dari penelitian. Ia menekankan bahwa tema-tema ini harus relevan dengan fokus penelitian dan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Creswell juga menyoroti pentingnya proses reflektif dalam mengidentifikasi tema. Teknik analisis data dilakukan secara tematik dengan mengutamakan elemen-elemen seperti bagaimana kebijakan politik Orde Baru, kolonialisme, dan intervensi internasional membentuk identitas nasional Timor Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Sejarah Timor Timur Sebelum dan Selama Integrasi dengan Indonesia

Sebelum berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1976, Timor Timur memiliki sejarah yang panjang. Selama menjadi koloni Portugal pada tahun 1600-an, wilayah ini menerima budaya dan struktur pemerintahan kolonial yang berbeda dari Indonesia, yang sebagian besar adalah koloni Belanda. Setelah Revolusi Bunga di Portugal pada tahun 1974, pemerintah kolonial Portugal mulai melonggarkan kendalinya, memberi Timor

Timor kesempatan untuk memilih masa depannya sendiri. Setelah kejadian tersebut, terjadi perselisihan politik internal di antara kelompok-kelompok seperti Fretilin, UDT, dan Apodeti, yang masing-masing memiliki perspektif yang berbeda tentang masa depan Timor Timur (Anderson B,1991) Indonesia melakukan operasi militer pada 7 Desember 1975 untuk mencegah penyebaran komunisme melalui Fretilin. Timor Timur diakui sebagai provinsi ke-27 Indonesia pada 17 Juli 1976, memulai proses integrasi formal. Namun, integrasi ini tidak mudah. Banyak orang di Timor Timur menganggap proses tersebut sebagai aneksasi yang mengabaikan keinginan orang di sana. Perlawanan bersenjata oleh kelompok seperti Falintil yang menginginkan kemerdekaan muncul selama proses integrasi (Schwarz,A,1994) Dari sudut pandang pembentukan identitas nasional, integrasi di Timor Timur menunjukkan konflik antara gagasan negara-negara Indonesia, yang didasarkan pada prinsip kesatuan dan Pancasila, dan kenyataan bahwa orang-orang di Timor Timur memiliki banyak budaya dan tradisi yang berbeda. Kebijakan pembangunan yang berfokus pada sentralisme seringkali mengabaikan kebutuhan masyarakat Timor Timur, sehingga mereka semakin jauh dari identitas nasional Indonesia (Kingsbury, D,2003) Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa orang-orang di Timor Timur terus menuntut kemerdekaan hingga referendum 1999 menentukan kemerdekaan mereka.

a. Peran Masyarakat dalam Pembentukan Negara Timor Timur

Masyarakat Timor Timur melakukan berbagai macam upaya dalam proses pemisahan Timor Timur dari Indonesia. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat Timor Timur seperti, demonstrasi, kampanye diplomasi, kegiatan pendidikan politik, referendum. Partai Fretilin merupakan salah satu partai komunis di Timor Timur yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia. Masyarakat Timor Timur dan partai fretilin melakukan kampanye diplomasi dan melebarkan jaringan ke dunia internasional, sehingga Indonesia menjadi sorotan setiap terjadi pergolakan di sana. Gerakan separatis tersebut dapat dibungkam oleh presiden soeharto, tindakan represif di masa Soeharto dapat memperkuat simpati rakyat Timor Timur untuk memisahkan diri dari NKRI. Pendekatan militer yang dilakukan Presiden Soeharto justru menimbulkan pelanggaran HAM. Pada akhirnya Presiden B.J. Habibie menawarkan dua opsi kepada masyarakat Timor Timur, yaitu memisahkan diri dari Indonesia atau menjadi daerah otonomi khusus.

2. Faktor Penyebab Pemisahan Timor-Timur dari Indonesia

a. Identitas Nasional dan Kewarganegaraan Di Timor-Timur

Ada banyak faktor yang memengaruhi pemisahan Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999. Ini termasuk sejarah, budaya, dan pergolakan politik. Karena Portugal menguasai Timor Timur saat Belanda menjajah Indonesia, latar belakang kolonial Timor Timur berbeda. Diferensiasi ini menghasilkan identitas budaya dan politik yang berbeda. Selain itu, masuknya Timor Timur ke Indonesia pada tahun 1976 melalui invasi militer memicu perlawanan dari masyarakat setempat, terutama karena pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama pendudukan. Proses pemisahan dipercepat oleh intervensi internasional, terutama dari PBB dan referendum tahun 1999, yang menunjukkan bahwa mayoritas orang memilih merdeka. Ini menunjukkan bagaimana perbedaan sejarah dan kegagalan integrasi dapat melemahkan pembentukan identitas nasional dalam konteks negara-negara (Anderson, 2001; Schwarz, 1999). Meskipun Timor Timur menjadi bagian Indonesia secara resmi pada tahun 1976, upaya untuk mengintegrasikan kehidupan sosial dan politiknya tidak berhasil. Membangun infrastruktur, sekolah, dan layanan kesehatan di wilayah ini adalah upaya pemerintah Indonesia, tetapi strategi ini tidak memperhitungkan perilaku sosial-budaya masyarakat lokal. Identitas Timor Timur yang didasarkan pada agama Katolik dan adat istiadat lokal sulit disesuaikan dengan konsep kebangsaan

Indonesia yang didominasi oleh Islam dan Pancasila. Selain itu, orang menganggap pemerintah pusat represif karena mengabaikan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Selama integrasi, militer Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Peristiwa seperti pembantaian Santa Cruz pada tahun 1991 menjadi simbol kekerasan yang mencakup pembunuhan massal, penghilangan paksa, dan pengungsian besar-besaran, dan menimbulkan kebencian terhadap pemerintah meskipun ada upaya pembangunan. (CAVR, 2005)

Isu HAM Timor Timur menarik perhatian internasional, terutama setelah pembantaian Santa Cruz. Tekanan diplomatik dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia serta kelompok masyarakat sipil global akhirnya memaksa Portugal untuk mengadakan referendum yang akan menentukan masa depan Timor Timur. Karena krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia pada tahun 1997–1998, Presiden B.J. Habibie memungkinkan pembicaraan ulang tentang status Timor Timur. Tujuan dari referendum tahun 1999 adalah untuk meningkatkan legitimasi internasional dan meningkatkan hubungan diplomatik. Meskipun milisi pro-integrasi melakukan kekerasan, 78% pemilih mendukung kemerdekaan dalam hasil referendum. (Taylor, 1999). Faktor utama yang mendorong kemerdekaan Timor Timur adalah kesadaran bahwa mereka adalah bangsa yang berbeda. Dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya, sejarah kolonialisme Portugis menghasilkan perbedaan budaya, agama, dan politik. Gerakan kemerdekaan seperti Fretilin memperjuangkan aspirasi ini melalui perjuangan bersenjata, diplomasi, dan kampanye politik. Pada akhirnya, referendum yang diadakan pada tahun 1999 menunjukkan bahwa perjuangan panjang orang-orang Timor Timur untuk menentukan nasib mereka sendiri telah berhasil. (Hill, 2002)

3. Identitas Nasional dan Kewargaan di Timor Timur

Identitas kewargaan dan nasional Timor Timur muncul sebagai hasil dari proses sejarah, budaya, dan politik yang panjang. Setelah melalui masa penjajahan Portugis dan integrasi dengan Indonesia, Timor Timur membangun identitas nasional dan konsep kewargaan yang berbeda. Itu menjadi merdeka pada tahun 2002. Identitas ini didasarkan pada kebiasaan lokal, kepercayaan agama, dan pengalaman sejarah perjuangan kemerdekaan di Timor Timur. Kombinasi budaya lokal, agama Katolik, dan sejarah perjuangan melawan negara lain membentuk identitas nasional Timor Timur. Agama Katolik menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Timor Timur selama pemerintahan Portugis. Agama Katolik menjadi identitas yang membedakan orang-orang Timor Timur dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ini berbeda dari Indonesia, di mana mayoritas orang beragama Islam. Selain agama, tradisi lokal seperti kebiasaan dan sistem kekerabatan, juga dikenal sebagai *uma lulik*, masih menjadi komponen penting dalam kehidupan orang Timor Timur, memberikan rasa kesatuan yang kuat di tengah ancaman dari luar. (Kingsbury, 2000).

Identitas nasional hanya terbatas pada hubungan lokal antar komunitas selama penjajahan Portugis. Namun, modernisasi dan pendidikan Portugis mulai menumbuhkan kesadaran politik. Ketika partai politik seperti Fretilin muncul pada 1970-an, mereka membawa konsep nasionalisme Timor Timur yang berbasis anti-kolonialisme dan keinginan untuk kemerdekaan, kesadaran ini meningkat. Pengalaman integrasi dengan Indonesia, yang diwarnai dengan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia, meningkatkan rasa kebangsaan Timor Timur dan mendorong persatuan di antara orang-orangnya. (Hill, 2002). Adapun dalam identitas kewargaan, meskipun Timor Timur mendapat kemerdekaan pada tahun 2002, ide kewargaan (*citizenship*) didasarkan pada prinsip inklusi.

Namun, ada kesulitan dalam menerapkannya. Konstitusi Timor-Leste mengakui

setiap orang yang lahir di Timor Timur, termasuk orang-orang yang tinggal di diaspora, sebagai warga negara. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengembalikan keharmonisan masyarakat, yang telah terpecah oleh konflik politik dan perang saudara yang terjadi pada tahun 1975, serta selama integrasi dengan Indonesia (CAVR, 2005). Namun, kewargaan di Timor Timur didefinisikan oleh status hukum mereka dan keterlibatan aktif dalam pembangunan negara. Misalnya, sejumlah besar orang yang tinggal di pengungsian selama masa konflik di Timor Timur kembali untuk membantu proses pembangunan negara setelah referendum. Keterlibatan warga negara dalam pemilu pertama pada 2002 dan pembentukan konstitusi menunjukkan keinginan mereka untuk membangun pemerintahan yang demokratis.

KESIMPULAN

Identitas nasional dan kewargaan dapat memainkan peran penting dalam pembentukan negara, seperti yang ditunjukkan oleh referendum yang dilakukan untuk memisahkan Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999. Ketegangan yang memicu kemerdekaan Timor Timur berasal dari perbedaan identitas budaya, agama, dan sejarah kolonial antara Indonesia dan Timor Timur. Identitas nasional Timor Timur yang dipengaruhi oleh kolonialisme Portugis, seperti agama Katolik, penggunaan bahasa Portugis, dan tradisi lokal, bertentangan dengan upaya integrasi pemerintah Indonesia yang berpusat pada Pancasila dan mendominasi budaya Islam. Akibatnya, kebijakan asimilasi yang diterapkan pemerintah Indonesia sering dianggap sebagai bentuk penjajahan baru, sehingga meningkatkan ketidakpuasan masyarakat Timor Timur terhadap status kewargaannya di Indonesia.

Masyarakat Timor Timur mendukung kemerdekaan mereka melalui demonstrasi, diplomasi internasional, dan pendidikan politik. Dengan mengadvokasi hak penentuan nasib sendiri, Partai Fretilin menjadi ujung tombak perlawanan. Seiring dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Indonesia, perjuangan rakyat Timor Timur mendapat dukungan internasional yang kuat. Meskipun pemerintah Indonesia berusaha membangun infrastruktur, sekolah, dan layanan publik di Timor Timur, mereka gagal memahami kebutuhan sosial-budaya lokal. Pemerintah Orde Baru mengambil tindakan represif, seperti pembantaian Santa Cruz pada tahun 1991, yang justru meningkatkan permusuhan masyarakat lokal terhadap Indonesia dan menarik perhatian internasional terhadap pelanggaran HAM di wilayah tersebut.

Presiden B.J. Habibie menawarkan referendum kepada rakyat Timor Timur setelah krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an. Referendum menunjukkan bahwa mayoritas penduduk memilih untuk merdeka. Keputusan ini menunjukkan keinginan rakyat Timor Timur untuk membangun negara baru yang lebih mencerminkan hak dan identitas mereka sebagai warga negara. Untuk mempertahankan integrasi nasional, pengakuan hak politik dan identitas budaya sangat penting. Selain menandai keberhasilan prinsip self-determination, referendum tahun 1999 mengajarkan negara-negara multikultural untuk menjadi lebih inklusif dalam kebijakan kewargaan dan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifa Fairuz Shabira, Syamsir, S., & Amanda Aprilia. (2023). ANALISIS RESOLUSI KONFLIK PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(7), 51–60. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i7.1197>
- Anderson, B. (2020). Imagined Communities. *The New Social Theory Reader*, 282–288. <https://doi.org/10.4324/9781003060963-46>
- Anderson, B. R. O. (Benedict R. O., & Internet Archive. (1991). Imagined communities :

- reflections on the origin and spread of nationalism. In Internet Archive. London ; New York : Verso. Retrieved from https://archive.org/details/imaginedcommunit0000ande_f5f1
- CAVR Timor-Leste. (n.d.). Retrieved from www.cavr-timorleste.org website: <http://www.cavr-timorleste.org/en/chegaReport.htm>
- Citizenship and nationhood in France and Germany: Brubaker, Rogers, 1956- : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive. (2010). Retrieved from Internet Archive website: <https://archive.org/details/citizenshipnatio00brub>
- Creswell, J. (2013). *QUALITATIVE INQUIRY & RESEARCH DESIGN THIRD EDITION 3*. Retrieved from https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7973605/mod_resource/content/1/Creswell_-John-W-Qualitative-Inquiry-and-Research-Design_-Choosing-Among-Five-Approaches-SAGE-Public.pdf
- Fiddle, S., & Marshall, T. H. (1951). Citizenship and Social Class: And Other Essays. *American Sociological Review*, 16(3), 422. <https://doi.org/10.2307/2087636>
- Gellner, E. (1983). *Nations and Nationalism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Horowitz, D. L. (2001). *Ethnic Groups in Conflict, Updated Edition With a New Preface*. Univ of California Press.
- Kammen, D. (2000). THE TROUBLE WITH NORMAL: THE INDONESIAN MILITARY, PARAMILITARIES, AND THE FINAL SOLUTION IN EAST TIMOR. In B. Anderson (Ed.), *Violence and the State in Suharto's Indonesia* (pp. 156-188). Ithaca, NY: Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501719042-007>
- Kingsbury, D. (2024). East Timor. Retrieved November 18, 2024, from Google Books website: https://books.google.co.id/books?id=ubPFAAAAQBAJ&pg=PA51&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false
- Martin, I., Weatherbee, D. E., Hainsworth, P., Shalom, S. R., McCloskey, S., Tanter, R., & Seldon, M. (2002). The East Timor Question: The Struggle for Independence from Indonesia/Bitter Flowers, Sweet Flowers: East Timor, Indonesia, and the World Community/Self-Determination in East Timor: The United Nations, the ballot, and international intervention. *Pacific Affairs*, 75(2), 333.
- Montserrat Guibernau. (2004). Anthony D. Smith on nations and national identity: a critical assessment. Retrieved November 17, 2024, from Nations and Nationalism website: https://www.academia.edu/82549362/Anthony_D_Smith_on_nations_and_national_identity_a_critical_assessment
- RENAN, E., & GIGLIOLI, M. F. N. (2018). *What Is a Nation? and Other Political Writings*. Columbia University Press. <http://www.jstor.org/stable/10.7312/rena17430>
- Riza Noer Arifa. (2024). NEGOSIASI INTEGRATIF UNTUK TIMOR TIMUR. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 3(2), 33–54. Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/11685/8664>
- Robinson, G. (2009). "If You Leave Us Here, We Will Die" How Genocide Was Stopped in East Timor. Princeton University Press.
- Schwarz, A. (2000). *A Nation In Waiting: Indonesia's Search For Stability* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429495489>.
- Timor-Leste: Twenty Years after the Self-Determination Referendum. (2020). Cambridge Core, 381–390. Retrieved from <https://www.cambridge.org/core/books/abs/southeast-asian-affairs-2020/timorleste-twenty-years-after-the-selfdetermination-referendum/4DC5B3129EAF977408E8CEADED674AB0>
- Weber, M., Gerth, H., Mills, C., & York, N. (1946). *POLITICS AS A VOCATION REPRINTED FROM MAX WEBER: ESSAYS IN SOCIOLOGY TRANSLATED, EDITED, AND WITH AN INTRODUCTION BY*. Retrieved from https://ia800802.us.archive.org/28/items/weber_max_1864_1920_politics_as_a_vocation/weber_max_1864_1920_politics_as_a_vocation.pdf.